

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Empiris pada OPD Kabupaten Wonosobo)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh:
Yona Wida Pramudita
NPM. 14.0102.0058

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2019**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Empiris pada OPD Kabupaten Wonosobo)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang**



Disusun Oleh:
Yona Wida Pramudita
NIM: 14.0102.0058

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2019**

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Wonosobo)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

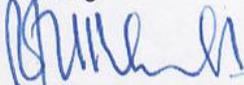
Yona Wida Pramudita

NPM **14.0102.0058**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal **07 Februari 2019**.....

Susunan Tim Penguji

Pembimbing

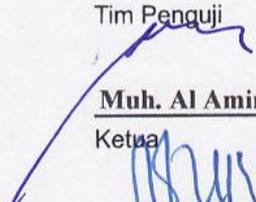


Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc., Ak

Pembimbing I

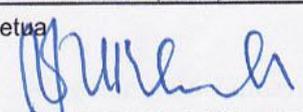
Pembimbing II

Tim Penguji



Muh. Al Amin, S.E., M.Si

Ketua



Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc., Ak

Sekretaris



Faqiatul Mariya W, S.E., M.Si

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal

17 JUN 2019



Dra. Marlina Kurnia, M.M

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yona Wida Pramudita
NIM : 14.0102.0058
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Wonosobo)

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaanya).

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 26 Januari 2019



eneliti

Yona Wida Pramudita
NIM. 14.0102.0058

MOTTO

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
(QS. Al-Baqarah 286)

Berdoa, berjuang dan berusaha.
(Sunarti)

Ilmu yang baik adalah ilmu yang bermanfaat bagi semua orang.
(Anonim)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka mana kala kamu telah selesai (dari urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain).
Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap.
(QS. Al-Insyirah: 6-8)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul “**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Wonosobo)**”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dra. Marlina Kurnia, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Nur Laila Yuliani, SE, M.Sc, AK selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan nasehatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai harganya dan telah membantu kelancaran selama menjalankan studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.
5. Keluarga tercinta yang telah memberikan keceriaan, semangat dan doa.
6. Para pegawai pemerintah daerah OPD seKabupaten Wonosobo atas kesediaannya sebagai responden dalam penulisan skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Magelang, 26 Januari 2019
Peneliti



Yona Wida Pramudita
NIM. 14.0102.0058

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Pernyataan Keaslian	iii
Motto	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Lampiran	x
Abstrak	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	
A. Telaah Teori	12
1. Teori Agensi	12
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	13
3. Penyajian laporan keuangan daerah.....	14
4. Aksesibilitas laporan keuangan daerah.....	16
5. Sistem pengendalian intern.....	16
6. Sistem keuangan akuntansi daerah	18
B. Telaah Penelitian Sebelumnya.....	19
C. Perumusan Hipotesis	21
D. Model Penelitian	27
BAB III METODA PENELITIAN	
A. Populasi dan Sampel.....	28
B. Data Penelitian.....	29
C. Variabel dan Pengukuran Variabel	30
D. Metoda Analisis Data	32
E. Pengujian Hipotesis	35
1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	35
2. Uji F.....	35
3. Uji t.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Sampel Penelitian.....	38
B. Statistik Deskriptif Responden.....	38
C. Deskriptif Variabel Penelitian.....	39
D. Uji Kualitas Data.....	41
1. Uji Validitas	41

2. Uji Reliabilitas	42
E. Analisis Regresi Linier Berganda	43
F. Uji Hipotesis	44
1. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	44
2. Uji F	44
3. Uji t	44
G. Pembahasan	48
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	55
B. Keterbatasan Penelitian	55
C. Saran.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Telaah penelitian sebelumnya	19
Tabel 2 Definisi dan pengukuran variabel	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Model Penelitian.....	27
Gambar 2.1 Penerimaan uji F.....	36
Gambar 2.2 Penerimaan uji t	37
Gambar 3.1 Hasil penerimaan uji F	45
Gambar 3.2 Uji t variabel penyajian laporan keuangan daerah	46
Gambar 3.3 Uji t variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah	47
Gambar 3.4 Uji t variabel sistem pengendalian intern.....	47
Gambar 3.5 Uji t variabel sistem akuntansi keuangan daerah	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar OPD Kabupaten Wonosobo	56
Lampiran 2. Kuesioner.....	58
Lampiran 3. Tabulasi Data Mentah.....	66
Lampiran 4. <i>Outout SPSS</i>	75

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Wonosobo)

Oleh:

Yona Wida Pramudita

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, sistem pengendalian intern, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sampel penelitian ini adalah 25 organisasi perangkat daerah kabupaten wonosobo. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan alat bantu SPSS versi 23.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kata kunci: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

-

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu tuntutan yang perlu direspon oleh pemerintah, karena perubahan tersebut mengakibatkan manajemen keuangan semakin kompleks. Terkait reformasi pengelolaan keuangan daerah adalah adanya penggunaan akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah (Soleha, 2014). Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Peraturan ini khusus mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah yang baru sesuai arah reformasi tata kelola keuangan negara atau daerah.

Peraturan yang sangat mendasar dalam peraturan ini adalah bergesernya fungsi *ordonancing* dari Badan atau Bagian Keuangan kesetiap OPD dan OPD sebagai *accounting entity* berkewajiban untuk membuat laporan keuangan. Organisasi sektor publik di Indonesia mengalami perkembangan yang luar biasa beberapa waktu terakhir ini. Perkembangan ini juga dialami oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah), sebagai salah satu bentuk organisasi publik. Kondisi ini semakin menguatkan tuntutan akuntabilitas atas organisasi pemerintahan. Salah satunya akuntabilitas finansial, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada para pemangku kepentingan yang dilaksanakan secara periodik.

Penyajian laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (Mardiasmo, 2002:78). Informasi keuangan yang dilaporkan oleh pemerintah daerah menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas. Salah satu prasyarat untuk dapat meningkatkan untuk dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat.

Menurut PP No. 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan akuntabilitas (Nordiawan, 2010:18). Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 103, dinyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat. Yang berarti pula bahwa

pemerintah daerah harus membuka akses kepada pihak pengguna secara luas atas laporan keuangannya melalui internet, surat kabar atau media lain.

Berdasarkan Bab 2 Pasal 2 PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan dibentuknya Sistem Pengendalian Intern adalah untuk: (1) Menjaga kekayaan organisasi, (2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, (3) Mendorong efisiensi, dan (4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Bastian 2010).

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem akuntansi daerah yang baik untuk mengelola keuangan secara adil, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Untuk dapat menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah secara baik harus dipenuhi beberapa hal yang merupakan syarat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Dalam sistem akuntansi keuangan daerah terdapat serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditujukan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan baik pihak intern maupun pihak ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi (Soleha, 2014).

Laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban keuangan daerah dan merupakan tanggung jawab atas akuntabilitas publik serta merupakan salah satu ukuran keberhasilan (kinerja) pemerintah daerah (Sinaga, 2005). Salah satu indikator pengelolaan akuntabilitas keuangan daerah dapat dilihat dari opini Audit Eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Opini BPK secara bertingkat terdiri atas: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar dengan Pengecualian (WDP) dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Di era ini Pemerintah Pusat menuntut setiap Pemerintah Daerah untuk mendapat opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu entitas pelaporan yang diwajibkan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, penyajiannya masih mengalami kendala-kendala atau masalah-masalah. Hal tersebut dibuktikan pada pembentukan “opini WDP” hasil audit BPK terhadap laporan keuangan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WDP DPP) yang menunjukkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melakukan pembenahan terhadap kelemahan dan ketidak patuhan dalam dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan karakteristik laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan (IHP BPK-RI, 2015). Namun, pada tahun 2016 dan 2017 BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang menunjukkan peningkatan opini. Opini WTP yang diberikan BPK tidak mengartikan bahwa

pelaksanaan pengelolaan keuangan di Kabupaten Wonosobo tidak membutuhkan koreksi, masih ada beberapa pemeriksaan yang perlu perbaikan utamanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (sumber dari DPPKAD). Disamping itu, hal ini menunjukkan rendahnya akuntabilitas publik pada pemerintahan tersebut.

Penelitian terdahulu terkait dengan akuntabilitas keuangan daerah telah banyak dilakukan akan tetapi beberapa hasil penelitian tersebut belum menunjukkan hasil yang konsisten. Frans (2011) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Diwilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasandutan, dan Kabupaten Samosir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, sedangkan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Namun berbeda dengan penelitian Sastra (2013) meneliti tentang Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Medan, yang mana hasil penelitiannya mengatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian Hehanussa (2015) mengenai Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Daerah Kota Ambon, yang mana hasil penelitiannya mengatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Lewier dan Kurniawan (2016) tentang Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten, memperoleh hasil bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah juga berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian Somad (2016) mengenai Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang, yang memperoleh hasil bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Fauziyah dan Handayani (2017) tentang Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surabaya,

memperoleh hasil bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah juga berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Adanya penerapan sistem pengendalian intern yang baik dan benar akan menjamin terwujudnya penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas yang tepat di masing-masing OPD. Penelitian Sari (2012) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan penelitian Nugraha (2011) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam menjalankan suatu entitas, baik itu entitas sektor publik maupun entitas swasta, diperlukan sistem akuntansi yang berkualitas untuk menyajikan laporan keuangan dengan kualitas informasi akuntansi yang sesuai dengan karakteristik yang telah ditentukan oleh standar akuntansi. Laporan keuangan pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan dana publik diharapkan memiliki kualitas informasi yang baik dan sesuai dengan standar. Penelitian Ratih (2012) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan penelitian Soleha (2011) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian Fauziyah dan Handayani (2017) dengan persamaan menguji kembali variabel pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah. Sedangkan perbedaannya, **pertama**, menambah variabel Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang merupakan hasil penelitian Soleha (2014). Alasan ditambahkan variabel Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah karena perlunya penelitian kembali mengenai penelitian pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah karena beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten.

Kedua, objek penelitian dilaksanakan di OPD Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Alasan memilih OPD Pemerintah Kabupaten Wonosobo karena pada tahun 2016 dan 2017 Pemerintah Kabupaten Wonosobo memperoleh hasil audit WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (www.wonosobokab.go.id), tetapi masih memiliki catatan seperti perlunya perbaikan dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan rendahnya akuntabilitas publik pada pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu secara lebih spesifik mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo sehingga memperoleh hasil audit WTP dari sisi variabel-variabel yang akan diuji.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
4. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

D. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat dan bagi peneliti terhadap bukti empiris dan mengetahui faktor-faktor

yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah OPD Kabupaten Wonosobo.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi peran OPD di Kabupaten Wonosobo dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah, bahwa penelitian ini dapat menjadikan suatu referensi maupun tinjauan secara nyata yang mendiskripsikan sejauh mana kinerja OPD untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- b. Bagi pemerintah Kabupaten Wonosobo, penelitian ini diharapkan menjadi referensi pegawai maupun pihak-pihak yang ada dalam pemerintah.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi alasan memilih judul penelitian berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB I TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Berisi teori sebagai dasar untuk menganalisa pokok-pokok masalah dalam penelitian berupa telaah teori hasil penelitian terdahulu, hipotesis dan model penelitian.

BAB III METODA PENELITIAN

Berisi gambaran dan tahapan penelitian yang menjelaskan tentang populasi, sampel, metode pengambilan sampel, definisi operasional, pengukuran variabel dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis data dan pembahasan. Bagian ini menjadi titik perhatian karena dilakukan pengolahan dan analisis data menggunakan bantuan program SPSS berupa analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas data, analisis regresi dan pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah teori

1. Teori Agensi

Teori agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori ini membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) dalam bentuk kontrak kerjasama yang disebut "*nexus of contract*". Purnamasari & Handayani (2015), dalam teori keagenan (*agency theory*), masalah agensi muncul ketika hubungan antara prinsipal dan agen dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*) karena agen berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui prinsipal. Dalam kondisi yang asimetri tersebut, agen dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Masalah keagenan pada pemerintahan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan kepentingan pribadinya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan, sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang wajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa

kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat. Tanggung jawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan. Pemerintah Daerah sebagai agen akan menghindari resiko berupa ketidakpercayaan *stakeholders* terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah (Purnamasari & Handayani, 2015).

2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2010) adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/Pemerintah Daerah dan pegawainya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas yaitu kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/

badan hukum/ pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut: 1) pertanggungjawaban dana publik; 2) penyajian tepat waktu; dan 3) adanya pemeriksaan (*audit*) respon pemerintah. Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para *stakeholder* yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban (Bastian, 2006:385).

3. Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (Vince & Rheny, 2015). Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin

besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Meskipun demikian, informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir akuntansi sektor publik. Informasi keuangan berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2009).

Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Menurut Nordiawan (2010), tujuan penyajian laporan keuangan adalah: (1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, (2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan, (3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan, (4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya, (5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber sumber penerimaannya, dan (6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan.

Menurut PP No. 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Menurut Bastian (2006), terdapat empat karakteristik kualitatif

pokok yaitu: (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat, dan (4) Dapat dipahami.

4. Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Christy & Heni, 2014). Menurut Bandariy (2011) aksesibilitas laporan keuangan adalah kemudahan berbagai pihak pengguna laporan keuangan untuk mengetahui informasi keuangan daerah. Menurut (Alnur, 2016) aksesibilitas laporan keuangan adalah kemampuan untuk memberikan akses bagi stakeholder untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi stakeholder. Menurut Mardiasmo (2009; 171), laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggung jawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (*accountability* dan *stewardship*).

Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah. Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga dan kualitas pelayanan yang diberikan (Mardiasmo, 2009). Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban

untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

5. Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian yang berupa pengendalian internal dan pengendalian manajemen berada di bawah kendali eksekutif (pemerintah pusat dan daerah) dan dilakukan untuk memastikan strategi dijalankan dengan baik sehingga tujuan dapat dicapai, sedangkan pemeriksaan (*audit*) dilakukan oleh badan yang memiliki kompetensi dan independensi untuk mengukur apakah kinerja eksekutif sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002). Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 2 menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/ pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/ walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dengan penerapan sistem pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Sistem pengendalian intern tersebut harus memuat prosedur rekonsiliasi antara data transaksi keuangan yang diakuntasikan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi keuangan yang diakuntasikan oleh Bendahara Umum Negara/ Daerah (PP No. 8 Tahun 2006).

6. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 pasal 232, sistem akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai serangkaian prosedur mulai dari proses, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan, pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Menurut Halim (2008) sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan, transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditujukan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak intern dan pihak ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi. Prosedur yang dimaksud adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) suatu entitas.

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil
1.	Frans (2011)	<p>Dependen : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Independen : Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan</p>	<p>Penyajian laporan keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.</p>
2.	Sastra (2013)	<p>Dependen : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Independen : Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah</p>	<p>Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>Aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.</p>
3.	Hehanussa (2015)	<p>Dependen : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Independen : Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah</p>	<p>Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.</p>

(Lanjutan) Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Variabel/Judul Penelitian	Hasil
4.	Lewier dan Kurniawan (2016)	Dependen : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Independen : Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
5.	Somad (2016)	Dependen : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Independen : Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
6.	Fauziyah dan Handayani (2017)	Dependen : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Independen : Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sumber: data penelitian terdahulu, 2019

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, PSAP No. 1 menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

Menurut PP No. 24 tahun 2005 menjelaskan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan menciptakan akuntabilitas. Penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2006).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah berupa laporan keuangan daerah kepada pengguna laporan pemerintah. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang

undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpangan dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

OPD sebagai agen bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan juga kepada masyarakat karena merupakan pertanggungjawaban publik. OPD memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan akuntabilitas untuk memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan, demi terlaksananya transparansi keuangan kepada publik sesuai peraturan yang berlaku. Tugas para pegawai dalam menyusun laporan keuangan di dalam instansi OPD harus mematuhi peraturan yang berlaku salah satunya yaitu PP No. 24 Tahun 2005. Apabila penyajian laporan keuangan dilaksanakan sesuai PP No. 24 tahun 2005 maka akan tercipta transparansi dan nantinya akan menciptakan akuntabilitas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sastra (2013), Hehanussa (2015), Lewier & Kurniawan (2016), Somad (2016) dan Fauziah & Handayani (2017) memperoleh hasil bahwa Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H1. Penyajian Laporan Keuangan Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Aksesibilitas laporan keuangan daerah merupakan penyebab dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah karena kemudahan aksesibilitas menjadikan akuntabilitas terhadap laporan keuangan daerah tersebut. Selain menyajikan laporan keuangan, hal lain yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan akses laporan keuangan bagi para pengguna laporan keuangan. Alasannya adalah menyajikan laporan keuangan tapi tidak memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan maksimal sehingga dapat dikatakan bahwa dengan memberikan kemudahan akses kepada para pengguna laporan keuangan akan menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan terwujudnya kepercayaan pihak kepada Pemerintah Daerah (Wahyuni et al., 2014).

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Bastian, 2006). Agar pemerintah dapat menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik maka pemerintah daerah harus

menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat secara terbuka dengan mengembangkan sistem informasi keuangan daerah.

Apabila pemerintah telah menyajikan laporan keuangan dengan baik tetapi tidak memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan dengan baik. Dengan memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan maka publik (badan pemeriksa, masyarakat maupun investor) dapat mengontrol pertanggungjawaban penggunaan aset daerah dan kebijakan keuangan yang diambil oleh pemerintah daerah. Dengan adanya kontrol yang baik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Frans (2011), Hehanussa (2015), Lewier & Kurniawan (2016), Somad (2016), dan Fauziyah & Handayani (2017) memperoleh hasil bahwa Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H2. Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengendalian yang berupa pengendalian internal dan pengendalian manajemen berada di bawah kendali eksekutif (pemerintah pusat dan daerah) dan dilakukan untuk memastikan strategi dijalankan dengan baik

sehingga tujuan dapat dicapai, sedangkan pemeriksaan (*audit*) dilakukan oleh badan yang memiliki kompetensi dan independensi untuk mengukur apakah kinerja eksekutif sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002). Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 2 menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/ pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/ walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dengan penerapan sistem pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Pemerintah daerah sebagai agen dari pemerintah pusat diharapkan mampu melaksanakan pengendalian internal dengan menjunjung prinsip transparansi terhadap laporan keuangan, agar terhindar dari kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi. Perwujudan pengendalian internal yang diinginkan perlu didukung oleh para pegawai yang ada di dalamnya. Hukum dan peraturan yang berlaku harus dipenuhi oleh para pegawai OPD. Semakin terarahnya pengendalian internal di dalam OPD maka pengendalian transparansi laporan keuangan akan mudah dicapai.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Soleha (2014), Prahara (2014) Rahmadani (2017), dan Rahmi, dkk (2017) memperoleh hasil bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan positif terhadap

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H3. Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

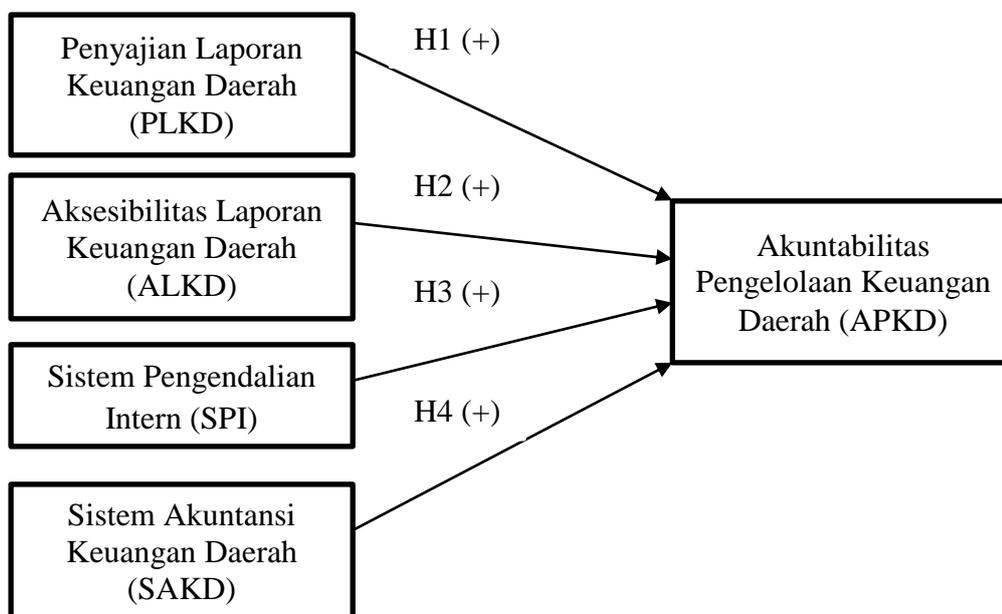
Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008). Selain itu, hal yang mendasar mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah manfaat Penerapan Sistem Akuntansi Daerah berdasarkan standart akuntansi pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah. Penerapan Akuntansi di dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah salah satunya adalah Sistem Akuntansi.

Apabila penerapan standar akuntansi pemerintah daerah dilakukan secara benar dalam menyajikan laporan keuangan, maka pertanggungjawaban atas laporan keuangan akan menjadi baik di setiap daerah, dan setiap individu maupun OPD. Penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sehingga diharapkan mampu mengurangi perilaku menyimpang dengan sistem.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Soleha (2014), Fathia (2017), dan Rahmi, dkk (2017) memperoleh hasil bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H4. Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

D. Model Penelitian



Gambar 1.1
Model penelitian

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah atau komunitas yang terdiri atas objek/ subjek yang dimiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:23). Populasi dalam penelitian ini adalah OPD se-Kabupaten Wonosobo yaitu sebanyak 25 OPD. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* yaitu teknik *non random sampling* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan pada OPD.
2. Responden dalam penelitian ini adalah kepala dan staf subbagian akuntansi/ penatausahaan keuangan.
3. Responden ditetapkan pada kepala bagian, staf pencatatan keuangan/ akuntansi dan staf pemegang kas OPD. Penentuan kriteria responden ini dikarenakan pihak yang terkait berhubungan secara langsung dengan informasi keuangan di tiap-tiap OPD.

B. Data Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan data dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai dengan keinginan peneliti. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok tentang variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2012).

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik survey, yaitu dengan memberikan kuesioner yang langsung disebarkan kepada kriteria responden di OPD se-Kabupaten Wonosobo. Kuesioner yang telah diisi oleh responden, diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya tidak disertakan dalam analisis. Peneliti memilih cara demikian dengan pertimbangan bahwa metode survey langsung lebih efektif dan mengurangi resiko tidak kembalinya kuesioner yang telah disebar.

C. Variabel penelitian dan Pengukuran variabel

Tabel 2.
Definisi dan Pengukuran variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran
Variabel Independen:		
1 Penyajian Laporan Keuangan Daerah (PLKD)	Penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (<i>openness</i>) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2006).	<p>Pengukuran variabel menggunakan 8 butir pernyataan diambil dari (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan), dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Relevan 2) Andal 3) Dapat dibandingkan 4) Dapat dipahami <p>Pengukuran variabel menggunakan Skala Likert 5 poin, dimana skala 1 (sangat tidak setuju) hingga skala 5 (sangat setuju).</p>
2 Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (ALKD)	Aksesibilitas laporan keuangan merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. (Mardiasmo, 2009).	<p>Pengukuran variabel menggunakan 5 butir pernyataan diambil dari (Mardiasmo, 2009) dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Keterbukaan dalam publikasi laporan keuangan, 2) Kemudahan akses dalam pemerolehan informasi laporan keuangan. 3) <i>Accesible</i> <p>Pengukuran variabel menggunakan Skala Likert 5 poin, dimana skala 1 (sangat tidak setuju) hingga skala 5 (sangat setuju).</p>

Tabel 2
Definisi dan Pengukuran variabel (Lanjutan)

Variabel	Definisi	Pengukuran
Variabel Independen:		
3 Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Sistem pengendalian intern adalah suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan didalam organisasi dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik organisasi, memeriksa ketelitian dan kebenaran dataakuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan (Halim, 2013).	<p>Pengukuran variabel menggunakan 9 butir pernyataan diambil dari Abdul Halim (2013) dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan yang memadai 2) Pemisahan wewenang 3) Tindakan disiplin atas pelanggaran <p>Pengukuran variabel menggunakan Skala Likert 5 poin, dimana skala 1 (sangat tidak setuju) hingga skala 5 (sangat setuju).</p>
4 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan, transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang diterima (Halim, 2008).	<p>Pengukuran variabel menggunakan 7 butir pernyataan diambil dari Halim, 2008), dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan Realisasi Anggaran 2) Neraca 3) Laporan Arus Kas 4) CaLK <p>Pengukuran variabel menggunakan Skala Likert 5 poin, dimana skala 1 (sangat tidak setuju) hingga skala 5 (sangat setuju).</p>

Tabel 2
Definisi dan Pengukuran variabel (Lanjutan)

Variabel	Definisi	Pengukuran
1. Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (APKD)	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah (Halim, 2007).	Pengukuran variabel menggunakan 8 butir pernyataan, dengan indikator yang diukur menggunakan skala likert 5 poin (Mardiasmo, 2002): 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum 2) Akuntabilitas proses 3) Akuntabilitas program 4) Akuntabilitas kebijakan Pengukuran variabel menggunakan Skala Likert 5 poin, dimana poin 1 (sangat tidak setuju) hingga poin 5 (sangat setuju).

D. Metode Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian (nama instansi, nama responden, jenis kelamin, umur, jenjang pendidikan, tingkat jabatan dan lama masa kerja). Penelitian juga menggunakan statistik deskriptif yang terdiri dari *mean*, *deviasi standar*, *minimum* dan *maksimum* (Ghozali 2018:19).

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid dan tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh

kuesioner tersebut (Ghozali, 2018:51). Menguji validitas instrumen kuesioner penelitian ini menggunakan uji validitas dengan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA). *Confirmatory Factor Analysis* digunakan untuk menguji apakah suatu variabel mempunyai unidimensionalitas atau apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah variabel. Analisis faktor konfirmatori dapat menguji apakah indikator benar-benar merupakan indikator dari variabel tersebut. Analisis faktor konfirmatori akan mengelompokkan masing-masing indikator ke dalam beberapa faktor apabila indikator yang digunakan merupakan indikator konstruk, kemudian akan mengelompok menjadi satu dengan faktor loading yang tinggi.

Ketika pada pengelompokan terdapat kesulitan dalam menginterpretasikan maka perlu dilakukan rotasi. Alat penting untuk interpretasi faktor adalah faktor *rotation*. Rotasi ortogonal melakukan rotasi dengansudut 90 derajat, sedangkan rotasi yang tidak 90 derajat disebut oblique rotation. Rotasi orthogonal dapat berbentuk *Quartimax*, *Varimax*, *Equimax* dan *Promax* (Ghozali, 2018:55).

Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor adalah data matrik harus memiliki korelasi yang cukup (*sufficient correlation*). Uji *Bartlett of Sphericity* merupakan uji statistik untuk menentukan ada tidaknya korelasi antar variabel. Semakin besar sampel menyebabkan *Bartlett test* semakin sensitif untuk mendeteksi adanya korelasi antara variabel. Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur

tingkat interkorelasi antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah *Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA). Nilai KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus $> 0,50$ dan *cross loading* > 0.50 untuk dapat dilakukan analisis faktor (Ghozali, 2018:57).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama. Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan, maka peneliti menggunakan koefisien *cronbach alpha* (α) lebih besar dari 0,70 atau 70% (Ghozali, 2018: 46).

c. Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda adalah suatu teknik statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dependen dan beberapa variabel independen.

$$APKD = \alpha + PLKD\beta_1 + ALKD\beta_2 + SPI\beta_3 + SAKD\beta_4 + e$$

Keterangan :

APKD	= Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
α	= Nilai intersep (konstan)
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien Regresi
PLKD	= Penyajian Laporan Keuangan Daerah
ALKD	= Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah
SPI	= Sistem Pengendalian Intern
SAKD	= Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
e	= error

E. Pengujian Hipotesis

1. Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2013: 97). Uji R^2 menunjukkan potensi pengaruh semua variabel independen yaitu penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, sistem pengendalian intern, dan sistem akuntansi keuangan terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Besarnya koefisien 0 sampai 1, semakin mendekati 0 koefisien determinasi semakin kecil pengaruhnya terhadap variabel bebas, sebaliknya mendekati 1 besarnya koefisien determinasi semakin besar pengaruhnya terhadap variabel bebas (Ghozali, 2018:97)

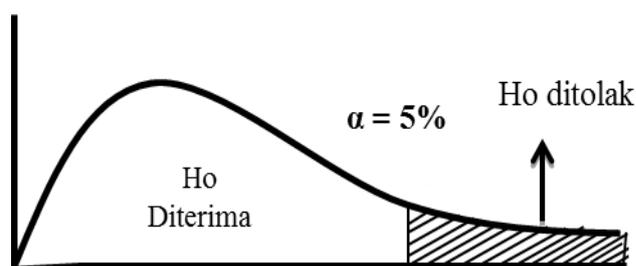
2. Uji F (*Goodness of Fit*)

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*Goodness of Fit*). Uji F menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah fit atau tidak (Ghozali, 2018:98). Ketentuan menilai hasil hipotesis uji F adalah berupa level signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pemilang $df = k$ dan derajat kebebasan penyebut ($df = n-k-1$) dimana k adalah jumlah variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan membandingkan kriteria:

- 1) Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$, atau $p\ value < \alpha = 0,05$ maka model yang digunakan dalam penelitian bagus (*fit*).

2) Jika $f_{hitung} < f_{tabel}$, atau $p\ value > \alpha = 0,05$ maka model yang digunakan dalam penelitian tidak bagus (tidak *fit*).

Perbandingan nilai kritis yang diperoleh ini selanjutnya akan dikonfersikan dengan nilai tabel sesuai dengan ketentuan dalam.



F Tabel

Gambar 2.1
Penerimaan Uji F

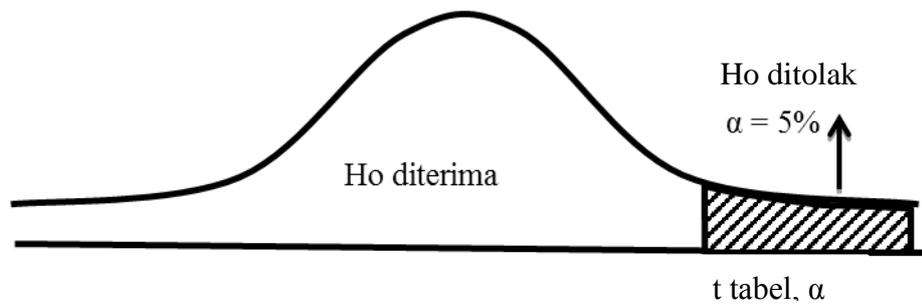
3. Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independendalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan t tabel (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = n-1$ (Ghozali, 2018:99)

1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau $p\ value < \alpha = 0,05$ maka ho ditolak dan ha diterima berarti variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, atau $p\ value > \alpha = 0,05$ maka ho diterima dan ha tidak

diterima berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.



Gambar 2.2
Penerimaan Uji t

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern, dan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Sampel yang diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh 63 kuesioner yang dapat diolah.

Hasil *Adjusted R Square* menunjukkan bahwa variabel dalam menjelaskan Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 13,20% sedangkan sisanya 86,80% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak diteliti atau diluar model regresi penelitian ini. Hasil uji F menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel yang artinya model yang digunakan sudah bagus.

Hasil uji t menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini mempunyai keterbatasan sampel yang digunakan hanya di lingkup OPD Kabupaten Wonosobo.

2. Penelitian ini mempunyai keterbatasan memiliki tingkat *Adjusted R Square* yang rendah.

C. Saran

1. Keterbatasan sampel yang digunakan maka penelitian selanjutnya dapat menambahkan jumlah sampel dengan cara menambahkan populasi di Kabupaten atau Kota lain agar lebih mudah untuk menggeneralisasikan hasil penelitian dan perlu dilakukan penelitian ulang dengan aspek-aspek yang sama untuk mengetahui konsistensi hasil dari penelitian sebelumnya.
2. Penelitian selanjutnya mencari kuesioner yang item pernyataannya lebih sesuai dengan keadaan sebenarnya pada Kabupaten atau Kota yang akan diteliti serta memperbaiki terlebih dahulu kuesioner yang digunakan dalam penelitian sehingga kuesioner yang akan digunakan selanjutnya memiliki tingkat *R Square* yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alnur, W. 2016. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah. *JOM FEKON*. Volume I; (12-16)
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: BPFE Yogyakarta
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit Erlangga :Jakarta
- Christy, N., & Heni, K. 2014. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten. *E-journal UAJY*.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2008. *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN
- Halim, Abdul. 2013. *Analisis Investasi*. Jakarta: Salemba Empat
- Hehanussa, S. J. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. *Skripsi*. Universitas Kristen Indonesia.
- Fathia, Nurul. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). *Skripsi*. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Fauziyah, R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*.
- Frans, J. 2011. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan SKPD Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD. Tesis. Universitas Sumatera Utara.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jensen & Meckling. 1976. *The Theory of The Firm: Manajerial Behavior Agency Cost, and Ownership Structure*, *Journal of Financial and Economics*

- Lewier, J., & Kurniawan, H. 2016. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerahn Kabupaten Klaten. *E-journal*.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. Volume II; (1-17)
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Nordiawan. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Nugraha, Darya. 2011. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Aset Tetap Pemerintah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Cimahi), *Jurnal Sigma-Mu*. Volume III; No.1 – Maret 2011)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Keuangan Negara*
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*
- Peraturan Pemerinta No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*

- Prahara, Persia. 2014. Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Akuntabilitas Keuangan. *Skripsi*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Purnamasari, & Handayani. 2015. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama*.
- Rahmadani, R. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah serta Dampaknya terhadap Akuntabilitas Keuangan. *Journal Uinjkt*.
- Rahmi, A., Agusti, R., & Wiguna, M. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan, dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. (<https://media.neliti.com>), diakses 11 Februari 2017)
- Ratih, Asri Eka. 2012. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kinerja SKPD pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. *Tesis*. Medan: Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
- Sari, Diana. 2012. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Procceding*.
- Sastra, Yuni. 2013. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Medan. *Skripsi*. Medan: Universitas Negeri Medan.
- Sinaga, D. 2005. *Pengantar Manjaemen Keuangan*. Yogyakarta: CV. Andi Ofsett
- Soleha, N. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan: Studi pada SKPD Kabupaten/Kota Propinsi Banten. *Jurnal Etikonomi*. Volume XIII; (22-24)
- Somad, A. 2016. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama*.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 103 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Vince, R., & Rheny, H. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simalungun. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*. 2; (1–16)

Wahyuni, P. S., Luh, N., Erni, G., & Trisna, N. 2014. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *E-jurnal Undiksha*. Volume II; (1).

Warisno. 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. *Tesis*. Medan: Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.